



MODEL PENGEMBANGAN LITERASI KEWARGANEGARAAN BERBASIS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI TINGKAT SMA

Farhatin Karima¹⁾, Supriyadi²⁾, Mohammad Nasir³⁾

^{1,2,3)} Universitas Kristen Cipta Wacana

Email: farhatinkarima@gmail.com

ABSTRAK: Korupsi masih menjadi persoalan sistemik di Indonesia yang melemahkan tata kelola publik dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada tingkat SMA sering kali belum optimal dalam membentuk sikap serta perilaku anti-korupsi peserta didik. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menguji model literasi kewarganegaraan berbasis pendidikan anti-korupsi yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap integritas, serta partisipasi kewarganegaraan siswa SMA. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan strategi mixed-methods sekuensial eksplanatori. Tahapan meliputi analisis kebutuhan, validasi pakar, uji coba terbatas, serta evaluasi efektivitas melalui desain kuasi-eksperimental pretest–posttest dengan kelompok kontrol, dilengkapi wawancara, FGD, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dikembangkan efektif meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan konatif siswa. Analisis kuantitatif memperlihatkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan antikorupsi, sikap pro-integritas, dan niat melaporkan praktik korupsi, sedangkan data kualitatif menegaskan perubahan norma kelompok serta praktik kelas yang lebih menghargai kejujuran. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi eksplisit pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum PPKn serta perlunya dukungan kebijakan, pelatihan guru, dan monitoring berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan model. Temuan ini diharapkan berkontribusi pada penguatan pendidikan karakter dan pembentukan generasi muda yang berintegritas.

Kata kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Integritas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter

ABSTRACT: Corruption remains a systemic issue in Indonesia that undermines public governance and erodes public trust. On the other hand, Pancasila and Civic Education (PPKn) learning at the senior high school level often falls short in shaping students' attitudes and behaviors against corruption. This study aims to develop and test a civic literacy model based on anti-corruption education designed to enhance high school students' knowledge, integrity attitudes, and civic participation. The research employs a Research and Development (R&D) approach with a sequential explanatory mixed-methods strategy. The stages include needs analysis, expert validation, limited trials, and effectiveness evaluation through a quasi-experimental pretest–posttest design with a control group, supplemented by interviews, focus group discussions (FGDs), and observations. The findings indicate that the developed model effectively improves students' cognitive, affective, and conative domains. Quantitative analysis shows a significant increase in anti-corruption knowledge, pro-integrity attitudes, and intentions to report corrupt practices, while qualitative data confirm changes in group norms and classroom practices that value honesty. The implications of this study emphasize the importance of explicitly integrating anti-corruption education into the PPKn curriculum, as well as the need for policy support, teacher training, and continuous monitoring to ensure the model's sustainability. These

findings are expected to contribute to strengthening character education and fostering a generation of youth with integrity.

Keywords: Anti-Corruption Education, Integrity, Pancasila and Civic Education, Character Education.

Pendahuluan

Literasi kewarganegaraan dan pendidikan anti-korupsi merupakan komponen esensial dalam pembentukan kompetensi warga negara yang kritis, etis, dan partisipatif pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) (Bustan & Mailani, 2022). Literasi kewarganegaraan tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, melainkan juga kemampuan berpikir kritis, keterampilan berargumentasi secara rasional, serta disposisi moral untuk bertindak demi kepentingan publik (Angelia et al., 2022). Di waktu yang bersamaan, pendidikan anti-korupsi menekankan pemahaman tentang dampak korupsi, nilai-nilai integritas, serta praktik pencegahan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Alanur, 2023). Mengingat masa remaja adalah periode pembentukan norma dan kebiasaan, integrasi antara literasi kewarganegaraan dan pendidikan anti-korupsi di sekolah menengah menjadi intervensi strategis untuk membangun budaya integritas jangka panjang (Istiqamah & Asmar, 2022).

Di Indonesia, upaya penanggulangan korupsi telah memperoleh perhatian institusional dan publik yang intensif (Trisiana et al., 2024). Namun demikian, korupsi tetap menjadi persoalan sistemik yang berdampak pada kualitas tata kelola publik, kepercayaan masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan (Supriadi et al., 2025). Menurut Idang Ramadhan et al, (2024) dalam konteks pendidikan, tantangan yang sering diidentifikasi adalah terfragmentasinya materi, dominasi pendekatan normatif, serta minimnya strategi pembelajaran yang menghubungkan konsep teoretis dengan praktik pencegahan korupsi yang konkret. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembelajaran kewarganegaraan belum sepenuhnya efektif dalam membentuk sikap dan perilaku anti-korupsi pada peserta didik (Mustopa & Susanti, 2023).

Kesenjangan antara tujuan kurikulum dan praktik pembelajaran ini menjadi alasan utama perlunya pendekatan pengembangan yang sistematis. Banyak program PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) cenderung menekankan penguasaan konseptual tanpa memadai memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis, literasi media, literasi hukum, dan pengalaman partisipatif yang dapat mendorong

tindakan antikorupsi. Selain itu, peran guru sebagai fasilitator perubahan perilaku memerlukan model pembelajaran yang menyediakan bahan ajar, strategi penilaian, dan kegiatan pembelajaran aktif yang terukur dan kontekstual bagi siswa SMA.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah model literasi kewarganegaraan berbasis pendidikan anti-korupsi yang sesuai untuk implementasi di tingkat SMA. Model ini diharapkan tidak hanya mencakup aspek kognitif berupa pengetahuan, afektif berupa sikap dan nilai, serta konatif berupa keterampilan dan perilaku, tetapi juga menyediakan panduan pedagogis, instrumen penilaian, dan prosedur evaluasi yang dapat diuji kelayakan serta efektivitasnya dalam konteks sekolah menengah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab sejumlah pertanyaan kunci yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Pertama, bagaimana desain konseptual dan komponen utama model literasi kewarganegaraan berbasis pendidikan anti-korupsi untuk SMA dapat disusun secara sistematis? Kedua, sejauh mana model tersebut valid, layak, dan dapat diterapkan menurut penilaian ahli maupun praktisi pendidikan? Ketiga, apakah penerapan model ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku anti-korupsi sekaligus memperkuat partisipasi kewarganegaraan siswa SMA? Keempat, faktor-faktor kontekstual apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi serta keberlanjutan model di sekolah?

Secara metodologis, penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan strategi mixed-methods, yang diawali dengan perancangan berbasis kajian literatur dan analisis kebutuhan, dilanjutkan validasi oleh panel ahli dan praktisi, uji coba terbatas di sekolah mitra, serta evaluasi kuantitatif dan kualitatif terhadap hasil pembelajaran maupun pengalaman pemangku kepentingan.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka integratif literasi kewarganegaraan dan pendidikan anti-korupsi, serta kontribusi praktis melalui model pedagogis yang dapat diadaptasi oleh pembuat kebijakan, pengembang kurikulum, dan guru PPKn di SMA. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan, baik di tingkat sekolah maupun nasional, untuk memperkuat PPKn yang lebih aplikatif, kontekstual, dan berorientasi pada

pembentukan karakter integritas sehingga generasi muda terbangun sebagai warga negara yang berpengetahuan, beretika, dan responsif terhadap upaya pencegahan korupsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan strategi mixed-methods sekuensial eksplanatori, yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara bertahap (Okpatrioka Okpatrioka, 2023). Tahapan penelitian mencakup analisis kebutuhan dan perancangan model intervensi berbasis kajian literatur dan konteks lapangan, validasi instrumen serta model oleh panel ahli, uji coba terbatas (pilot) untuk menilai kelayakan dan keterlaksanaan, serta evaluasi efektivitas melalui desain kuasi-eksperimental pretest–posttest dengan kelompok kontrol. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif pada sekolah menengah atas dengan variasi negeri swasta, perkotaan perdesaan, serta tingkat sosial-ekonomi. Partisipan penelitian adalah siswa kelas X–XII mata pelajaran PPKn, dengan sampel kuantitatif ditentukan melalui stratified random sampling, sedangkan kriteria eksklusi diterapkan pada sekolah yang sedang mengikuti program serupa.

Pengembangan model dilakukan melalui kajian literatur, analisis kebutuhan (survei dan wawancara guru/kepala sekolah), serta perancangan bahan ajar, dengan validasi isi oleh pakar pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter menggunakan Content Validity Index (CVI). Instrumen kuantitatif mencakup kuesioner pengetahuan antikorupsi, sikap terhadap integritas, serta niat dan perilaku kewarganegaraan, sedangkan instrumen kualitatif berupa panduan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data dikumpulkan pada tahap pra-intervensi, implementasi, dan pasca-intervensi, kemudian dianalisis dengan uji statistik inferensial (t-test, ANCOVA, ukuran efek) untuk data kuantitatif serta analisis tematik untuk data kualitatif. Integrasi hasil dilakukan pada tahap interpretasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, sementara kriteria evaluasi mencakup validitas, reliabilitas, efektivitas intervensi, fidelity implementasi, dan tingkat penerimaan guru maupun siswa.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan model literasi kewarganegaraan berbasis pendidikan anti-korupsi menghasilkan perubahan positif pada aspek kognitif, afektif, dan konatif peserta didik. Analisis kuantitatif memperlihatkan peningkatan

bermakna pada skor pengetahuan mengenai regulasi dan fakta antikorupsi serta pergeseran sikap yang mendukung integritas dan penolakan terhadap praktik korupsi. Selain itu, terdapat peningkatan niat partisipatif terutama kesediaan melaporkan praktik korupsi yang didukung oleh narasi dari wawancara mendalam dan FGD. Temuan kualitatif menguatkan hasil kuantitatif: siswa melaporkan peningkatan pemahaman konseptual, rasa percaya diri dalam bertindak, dan perubahan norma kelompok yang lebih menghargai kejujuran.

Lebih jauh, guru dan kepala sekolah menegaskan bahwa model ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis siswa tentang isu korupsi, tetapi juga membentuk habitus baru yang tercermin dalam praktik sehari-hari, seperti berkurangnya kecenderungan menyontek, meningkatnya keterbukaan dalam diskusi kelas, serta munculnya inisiatif kolektif untuk menegakkan aturan sekolah secara adil. Dengan demikian, model ini terbukti tidak hanya memperkuat dimensi pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam ranah sikap dan perilaku, sehingga memiliki potensi strategis sebagai instrumen pendidikan karakter dalam kerangka penguatan PPKn di sekolah menengah.

Pertama, temuan penelitian ini mempertegas pentingnya integrasi isu antikorupsi dalam kerangka pembelajaran PPKn yang tidak sekadar menekankan aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan afeksi moral dan keterampilan praksis siswa. Hal ini selaras dengan pandangan teoretis bahwa pendidikan kewarganegaraan idealnya berfungsi sebagai wahana pembentukan civic competence yang holistik, mencakup kemampuan berpikir kritis, kepekaan etis, dan kesediaan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dengan menempatkan isu antikorupsi sebagai bagian integral dari materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran, sekolah dapat membangun lingkungan belajar yang lebih relevan dengan tantangan sosial bangsa sekaligus memperkuat basis karakter integritas generasi muda.

Kedua, keberhasilan implementasi model ini juga menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata lebih efektif dalam membentuk perubahan perilaku dibandingkan pendekatan yang hanya normatif atau indoktrinatif. Siswa tidak hanya belajar melalui teori, tetapi juga berlatih menafsirkan kasus, mendiskusikan dilema moral, dan mensimulasikan tindakan

pencegahan korupsi dalam kehidupan sekolah. Pengalaman langsung ini memperkuat self-efficacy sekaligus memperluas ruang refleksi kritis yang memungkinkan internalisasi nilai berjalan lebih mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis bagi sekolah dalam memperkuat pendidikan karakter, tetapi juga menawarkan implikasi teoretis tentang bagaimana desain pendidikan kewarganegaraan yang relevan dapat dikembangkan untuk menjawab problematika korupsi secara lebih sistematis.

Mekanisme perubahan yang muncul berkaitan erat dengan karakter pedagogis intervensi: penggunaan studi kasus riil, diskusi interaktif, dan kegiatan reflektif yang menjembatani pengetahuan teoretis dengan praktik nyata. Pendekatan ini tampak efektif meningkatkan self-efficacy siswa dalam mengenali praktik korupsi dan menimbang tindakan pelaporan. Guru melaporkan pula perbaikan perilaku kelas (mis. berkurangnya perilaku mencontek dan peningkatan partisipasi diskusi), yang menandakan efek lintas-tingkat antara pengetahuan individual dan norma sekolah.

Perbandingan dengan kajian sebelumnya. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan partisipatif dapat meningkatkan pengetahuan politik-sivik, sikap pro-integritas, serta niat berperilaku etis. Sejalan pula dengan temuan studi antikorupsi edukatif yang menekankan pentingnya praktik pembelajaran aktif untuk memodifikasi sikap dan niat perilaku. Peran guru sebagai fasilitator dan kualitas bahan ajar muncul sebagai faktor penentu serupa yang dilaporkan di studi terdahulu.

Implikasi kebijakan dan praktik. Hasil penelitian mendukung rekomendasi integrasi komponen antikorupsi secara eksplisit ke dalam kurikulum PPKn dan penyusunan RPP yang menekankan pembelajaran aktif termasuk studi kasus, simulasi pelaporan, dan penilaian afektif. Untuk keberlanjutan dan skalabilitas, disarankan (1) pelatihan berkelanjutan bagi guru tentang pedagogi antikorupsi; (2) mekanisme monitoring fidelity pelaksanaan; dan (3) kolaborasi sekolah-komunitas untuk memperkuat norma transparansi. Kebijakan tingkat sekolah dan dinas pendidikan perlu memfasilitasi sumber daya serta evaluasi berkelanjutan agar perubahan sikap beralih menjadi praktik yang tahan lama.



Gambar 1. Integrasi Anti Korupsi di Sekolah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan instrumen self-report rentan terhadap social desirability bias, sehingga niat melaporkan mungkin overestimate terhadap perilaku nyata. Kedua, durasi pengamatan pasca-intervensi relatif pendek sehingga durabilitas perubahan perilaku jangka panjang belum terukur. Ketiga, generalisasi temuan dibatasi oleh desain sampling dan konteks lokasi; replikasi pada berbagai wilayah dan tipe sekolah diperlukan untuk mengukuhkan eksternal validitas.

Oleh karena itu, riset lanjutan sebaiknya menempuh desain longitudinal untuk menilai ketahanan efek intervensi dan menggambarkan apakah niat melaporkan bertransformasi menjadi perilaku nyata. Eksperimen teracak (RCT) atau desain kuasi-eksperimental yang lebih luas dapat menguatkan klaim kausalitas. Selain itu, penelitian mediator/moderator (mis. peran guru, iklim sekolah, dan modal sosial keluarga) akan membantu menjelaskan mekanisme perubahan. Kajian biaya-manfaat dan studi implementasi skala makin penting untuk memberikan dasar kebijakan yang praktis.

Secara keseluruhan, program literasi kewarganegaraan berbasis pendidikan anti-korupsi menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan niat partisipatif siswa SMA. Agar efek tersebut berkelanjutan dan berdampak pada perilaku nyata, diperlukan penguatan implementasi melalui pelatihan guru, monitoring fidelity, evaluasi longitudinal, dan dukungan kebijakan institusional.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa model literasi kewarganegaraan berbasis pendidikan anti-korupsi pada tingkat SMA efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai isu korupsi dan regulasi, memperkuat sikap pro-integritas, serta menumbuhkan niat partisipatif dalam mencegah dan melaporkan praktik korupsi. Strategi pembelajaran partisipatif seperti studi kasus, diskusi reflektif, dan simulasi pelaporan terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman sekaligus self-efficacy siswa. Hasil kualitatif juga menegaskan adanya perubahan norma kelompok dan praktik kelas yang lebih mendukung nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Dari perspektif pendidikan karakter, integrasi eksplisit tema anti-korupsi dalam kurikulum PPKn terbukti tidak hanya memperkuat aspek kognitif, afektif, dan konatif siswa, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembentukan iklim sekolah yang lebih etis dan berkarakter. Temuan ini menunjukkan bahwa PPKn berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran kewarganegaraan yang tinggi.

Namun demikian, keterbatasan penelitian seperti potensi bias dalam pengisian instrumen self-report dan periode observasi yang singkat menunjukkan perlunya kajian lanjutan. Penelitian longitudinal, uji coba eksperimen teracak, serta studi lintas konteks sekolah akan memperkaya pemahaman tentang efektivitas dan keberlanjutan model ini. Ke depan, eksplorasi faktor mediator dan moderator, termasuk peran guru, iklim sekolah, serta dukungan keluarga, perlu menjadi perhatian utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan kebijakan pendidikan karakter, khususnya dalam membangun literasi kewarganegaraan berbasis anti-korupsi yang aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak luas.

Daftar Rujukan

Alanur, S. N. (2023). Analysis of Curriculum 13 and Class XI Pancasila and Civic Education Textbook at Al-Azhar Mandiri High School Palu. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264602653>

- Angelia, I., Ananda, A., & Montessori, M. (2022). Development of problem-based learning model for corruption prevention in improving anti-corruption attitude in citizenship learning health certificate. *Linguistics and Culture Review*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246268620>
- Bustan, R., & Mailani, L. (2022). Effectiveness of anti-corruption counseling with psycho-religious approach to develop student integrity character. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 135–149. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.896>
- Hidayat, I., Wapa, A., & Nugroho, W. (2024). Manajemen aplikasi bimbingan konseling berbasis web. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 15(2), 121-130.
- Idang Ramadhan, Yunita Kusumaningrum, & Hanik Tri Wilujeng. (2024). Meningkatkan Keaktifan Siswa melalui Proyek Kewarganegaraan Antikorupsi di SMK Pawyatan Daha 2 Kediri. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3091>
- Istiqamah, & Asmar, Abd. R. (2022). MENINGKATAN PERILAKU ANTI KORUPSI MELALUI MODEL INVESTIGATIVE REPORT: INTEGRASI MATA PELAJARAN AGAMA DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(1), 151–175. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.865>
- Mustopa, A., & Susanti, S. S. (2023). Integral and Anti-Corruption Generation: The Implementation of A Model of Citizenship for Social Projects Based on Religion and School Culture. *Jurnal Educative: Journal of Educational Studies*, 8(2), 133. <https://doi.org/10.30983/educative.v8i2.7270>
- Okpatrioka Okpatrioka. (2023). Research And Development (R&D) Penelitian Yang Inovatif Dalam Pendidikan. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 1(1), 86–100. <https://doi.org/10.47861/jdan.v1i1.154>
- Supriadi, S., Zulfaidah, A., Nasir, M., & Dhayinta, S. T. (2025). Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Buatan Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar PPKn Siswa di SMA. *PEMA*, 5(2), 684–690. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema/article/view/1253>

- Trisiana, A., Priyanto, A., & Sutoyo, S. (2024). Analysis of Developing Anti-Corruption Education in Indonesia Through Media-Based Citizenship Education Learning Smart Mobile Civic. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 43(1), 166–175. <https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.60261>
- Sudrajad, W. (2025). THE ROLE OF STUDENTS'PSYCHOLOGICAL EXPLORATION IN CONTEMPORARY LITERATURE: A STUDY OF IAN MCEWAN AND JULIAN BARNES. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(2), 841–860. <https://doi.org/10.36841/consilium.v5i2.6399>
- Sudrajad, W., Fikri, M. H., & Putra, R. P. B. (2024). HELP ME CHATGPT! WHAT WAYS DOES CHATGPT INFLUENCE STUDENTS'PRODUCTIVITY AND CREATIVITY IN ENGLISH ACADEMIC WRITING? *EDUCATUM: Scientific Journal of Education*, 2(2), 48–57.
- Sudrajad, W., Sulistyaningsih, S., & Ulfa, F. (2023). Increasing Student's Ability to Write Descriptive Text Using the Brainstorming Method. *International Journal of English and Applied Linguistics (IJEAL)*, 3(2), 109–118.
- Wapa, A., Arnyana, I. B. P., & Suastra, I. W. (2024). The Influence Of The Creative Problem Solving (CPS) Model on Science Learning Outcomes in Terms Of Students' Multicultural Attitudes. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia*, 13(1), 27-35.
- Wibowo, S., & Fitriany, A. (2025). INTEGRASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH: STUDI PADA MATA KULIAH SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(1), 678–690.
- Yasin, M. I., Fikri, M. H., Sudrajad, W., & Dewi, M. (2025). Understanding Character Dialogue in Modern English Literature: A Qualitative Study on Students' Cognitive Processes in Literary Learning. *Journal of Development Research*, 9(1), 92–100.